

ANALISIS DAMPAK KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH

¹ Charis Christiani & ² Pratiwi Tedjo ³ Bambang Martono

¹ charis_18@rocketmail.com

² pratiwi.tedjo@yahoo.com

³ bambang_untag@yahoo.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah 1. Kebijakan kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah cukup memadai. 2. Kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan masih rendah. 3. Kepadatan Pendudukan Provinsi Jawa Tengah sebesar 995 jiwa /Km² dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 %. 4. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bidang pendidikan adalah melaksanakan program belajar 9 tahun, BOS, pemberian beasiswa keluarga kurang mampu dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan dan vokasi; bidang kesehatan dilakukan dengan program jamkesmas, jamkesda, peningkatan gizi, akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat miskin dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; bidang pendapatan dilakukan dengan pengembangan usaha ekonomi produktif, pendampingan UMKM, dan memberikan kemudahan akses permodalan bagi industri kecil atau mikro; Bidang pekerjaan dilakukan dengan pengembangan kewirausahaan dan pengadaan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja dalam dan luar negeri; Sedangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dilakukan dengan Inpres Desa Tertinggal, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti bedah rumah. 5. Kebijakan untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dilakukan dengan menyukseskan program KB dan untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk dilakukan dengan program transmigrasi.

Kata kunci : kepadatan penduduk, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan

ABSTRACT

This study uses quantitative research methods with descriptive type of data source in this study are primary and secondary. Data was collected with the literature and documentation techniques. While the data analysis is done with qualitative and quantitative analysis. The results of this study are 1. Population and family planning policies in Central Java province is quite adequate. 2. Quality of life in Central Java in the field of education is still low. 3. The occupation density at 995 Central Java Province soul / km² with a population growth rate of 0.37%. 4. Central Java provincial government policy in education is 9 years implementing learning programs, BOS, the granting of scholarships underprivileged families and the provision of facilities and infrastructure, equality and vocational education; health program conducted by jamkesmas, Jamkesda, nutrition, access to clean water and sanitation for the poor and the improvement of health infrastructure; areas of revenue made by productive business development, mentoring UMKM, and provide ease of access to capital for small and micro industries; field work was done with the development of entrepreneurship and the provision of education and training for workers at home and abroad; Meanwhile, to solve the problem of poverty do with Presidential Underdeveloped Villages, increasing the availability of socio-economic infrastructure such as surgical house. 5. Policies to cope with the population growth rate was the success of the family planning program and to address the problem of overcrowding is done with the transmigration program.

Keywords : population density, quality of life, education, health, employment and income

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kuantitas atau jumlah penduduk dapat sebagai potensi maupun menjadi beban bagi suatu negara, akan menjadi potensi apabila jumlah penduduk seimbang dengan sumber daya yang lain serta mempunyai kualitas hidup

yang baik. Sebaliknya, menjadi beban apabila jumlah penduduk melampaui kapasitas wilayah Negara tersebut.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ledakan penduduk, hal ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan

tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah tertentu.

Kualitas hidup manusia atau masyarakat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah kepadatan penduduk, ketersediaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat, pola hidup yang dianut oleh masyarakat, norma yang berlaku di suatu daerah dan lain-lain.

Dalam kenyataannya, kepadatan penduduklah yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, sebab adanya kepadatan penduduk yang tinggi akan banyak menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan masalah kependudukan misalnya kemiskinan, perumahan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Adanya permasalahan yang timbul tersebut akan membawa dampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

1.2. Permasalahan

Permasalahan dalam kajian ini adalah :
Bagaimana Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah

1.3. Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis Strategi dan kebijakan kependudukan di Jawa Tengah.
2. Menganalisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
3. Mendiskripsikan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah
4. Mendiskripsikan strategi dan kebijakan antisipasi peledakan penduduk Provinsi Jawa Tengah.

2. Kerangka Teori

2.1. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Ida Bagoes Mantra, 2007). Ukuran yang biasa digunakan adalah jumlah penduduk setiap satu Km² atau setiap 1 mil² . Permasalahan dalam

kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak merata.

Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduknya. Pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, Keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan.

Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari lingkungan, karena lingkungan merupakan sumber alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan pangan, papan, air bersih, udara bersih dan kebutuhan lainnya.

Ledakan penduduk yang cepat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat. Adapun dampak dari ledakan penduduk adalah :

- a. Semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan,yang layak). Akibatnya sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk.
- b. Tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada (sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi) serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan lain.
- c. Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada, akibatnya terjadilah peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pada menurunnya kualitas sosial (banyak tuna wisma, pengemis, kriminalitas meningkat dan lain-lain).

2.2. Kualitas Hidup Masyarakat

Indikator sosial ekonomi adalah indikator yang digunakan untuk memberikan tingkatan kemajuan ekonomi antara negara-negara maju dengan negara yang sedang berkembang, dan juga dapat memberi gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di tiap-tiap negara. Adapun indikator dari sosial ekonomi antara lain:

a. Pekerjaan (Mata Pencaharian)

Bekerja diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang, dalam kurun waktu tertentu.

Tenaga kerja adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat)

Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis. Angkatan kerja ini meliputi penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan.

b. Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi umum dari seseorang dalam semua aspek. Secara keseluruhan kesehatan dicapai melalui kombinasi dari fisik, mental, dan kesejahteraan sosial ekonomi.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan seluruh aspek yang ada di dalam kehidupan kita baik orang terdekat, masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada, baik yang terjadi secara formal maupun non formal dengan tujuan untuk mengubah

kebiasaan-kebiasaan tidak baik menjadi kebiasaan baik yang terjadi selama kita hidup untuk memperbaiki kualitas dari menjadi lebih baik dan mampu menjawab tantangan di masa depan.

d. Pendapatan

Besarnya penghasilan dapat mempengaruhi taraf hidup seseorang, semakin tinggi penghasilan akan makin tinggi pula taraf hidupnya. Taraf hidup seseorang dipengaruhi oleh rata-rata perkapita negara tersebut kekayaan rata-rata setiap orang di negara tersebut

Dalam Ekologi Manusia oleh Ir. Philip Kristanto (2004) Ada tiga kriteria yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas hidup manusia yaitu :

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati.

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan dasar atas udara, air bersih, pangan, papan dan kesehatan.

b. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi.

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pendidikan, pendapatan, transportasi, keadilan dan perlindungan hukum.

c. Terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih.

Kebutuhan ini meliputi : kebutuhan untuk memiliki kebebasan memilih yang dibatasi oleh hukum.

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metodologi kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari suatu gejala atau masalah yang diteliti. (Ulber Silalahi, 2009)

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, pengumpulan data –data

sekunder serta dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisa data digunakan analisa data kuantitatif dan kualitatif.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kondisi Geografis Dan Pemerintahan.

1. Letak Geografis

Sebagai salah satu provinsi di pulau Jawa, Jawa Tengah diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Jawa Tengah terletak antara 5° 40' dan 8° 30' Lintang Selatan dan antara 108° 30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

2. Luas Penggunaan Lahan

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,25 Juta hektar/ 32.548 km² atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari Indonesia. Luas yang ada terdiri dari 992 ribu hektar (30,47 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,53 persen) bukan lahan sawah.

3. Pemerintahan

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 553 kecamatan yang meliputi 8.550 desa/ kelurahan.

B. Kondisi Demografis

Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 32.382.657 orang dan luas wilayah 32.544,12 Km² maka rata-rata kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 995 jiwa/Km² dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37% per tahun. Sex Ratio di Provinsi Jawa Tengah yaitu 99, artinya setiap 100 perempuan terdapat 99 laki-

laki. Di Provinsi Jawa Tengah Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 46,97 sementara di daerah perdesaan 53,25. Rata-rata umur kawin pertama penduduk Jawa tengah laki-laki sebesar 25,3 tahun dan perempuan 22,1 tahun (SDKI 2007).

C. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan.

1. Pendidikan

Berdasarkan hasil SP 2010, persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 1,02 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 5,88 persen. di Provinsi Jawa Tengah persentase penduduk 5 tahun keatas yang tamat SM/ sederajat sebesar 14,51 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 1,64 persen, tamat DIV/S1 sebesar 2,29 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,14 persen dan AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 90,31 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada 90 orang yang melek huruf. AMH penduduk usia 15 tahun ke atas perempuan (86,94 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (93,82 persen). AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan (87,46 persen) lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan (93,68 persen).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS 13-15 tahun sebesar 84,84 persen. Ini menunjukkan masih terdapat kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) sebesar 15,16 persen yang tidak bersekolah. APS 16-18 tahun sebesar 50,64 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 12,93 persen. APS di perdesaan lebih rendah

dibandingkan perkotaan. Semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaannya (*gap*). Di perdesaan APS 7-12 tahun sebesar 97,03 persen, APS 13-15 tahun 81,74 persen, APS 16-18 tahun 43,42 persen, APS 19-24 tahun sebesar 6,87 persen. Di perkotaan APS 7-12 tahun sebesar 97,61 persen, APS 13-15 tahun 88,63 persen, APS 16-18 tahun 58,27 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 18,96 persen.

2. Kesehatan

Di Provinsi Jawa Tengah sampai pada tahun 2011 terdapat 67 Rumah Sakit pemerintah dan 179 Rumah Sakit khusus dan umum swasta. Selain Rumah Sakit terdapat pula sebanyak 867 buah Puskesmas yang tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan (Jawa Tengah dalam Angka 2012).

Untuk provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 tingkat kesehatannya cukup tinggi dengan Angka Kematian Bayi sebesar 10,75 dan Angka Harapan Hidupnya sebesar 72,6 . (Dinkes Jawa Tengah,)

3. Perumahan

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8,53 juta rumah yang terdiri dari tipe A (40,81 %) tipe B (35,87 %) serta tipe C (23,33%). Adapun alokasi dana bantuan APBN tahun 2011 Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,39 milliar rupiah didukung dengan swadaya masyarakat sebesar 782 juta rupiah telah berhasil dipugar rumah sebanyak 625 rumah di pedesaan

4. Air Bersih

Sampai tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 35 PDAM kota/kabupaten dengan 220,06 juta meter kubik air yang

dapat disalurkan kepada masyarakat. Air minum tersebut digunakan oleh rumah tangga sebesar 86,80 persen, disusul oleh usaha sebesar 6,04 persen, sosial sebesar 4,92 persen, dan industri sebesar 2,25 persen.

5. Kemiskinan

Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 6,12 juta atau sekitar 18,99 persen dari total penduduk Jawa Tengah. Garis kemiskinan pada tahun tersebut mencapai 181.877 rupiah per kapita. Kemudian jumlah penduduk miskin tahun 2009 menurun menjadi 5,66 juta atau sekitar 17,48 persen dari total penduduk Jawa Tengah, dengan batas miskin sebesar 201.651 rupiah per kapita per bulan.

Pada tahun 2010 penduduk miskin menurun lagi menjadi 5,22 juta atau sekitar 16,11 persen dari total penduduk Jawa Tengah dengan batas miskin 217.327 rupiah per kapita per bulan.

Pada tahun 2011, jumlah keluarga pra sejahtera di Jawa Tengah mencapai hampir 3 juta atau 28,79 persen dari total keluarga. Sementara itu, untuk jumlah keluarga sejahtera I, II, III serta III plus masing - masing tercatat 1,89 juta, 2,26 juta, 2,44 juta serta 400 ribu keluarga, atau dalam presentase berturut – turut sebesar 19,22 persen, 23,06 persen, 24,85 persen dan 4,08 persen.

4.1. Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Jawa Tengah

A. Strategi Dan Kebijakan Kependudukan di Provinsi Jawa Tengah

Arah kebijakan dan Strategi BKKBN tahun 2013 adalah

- 1) Visi : Penduduk Tumbuh Seimbang 2015
- 2) Misi : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
- 3) Sasaran :
 - a. Menurunnya Unmet Need menjadi 5,6 %
 - b. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran total (TFR) , yang di tandai dengan :
 - Tercapainya *Contraceptive Prevalance Rate* (CPR) sebesar 63,8%.
 - Terlayannya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta.
 - Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sebanyak 28,2 juta menjadi 29 juta.
 - Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB di 4.700 klinik KB untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan Kb di 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta.
 - Meningkatkan PUS,WUS, remaja dan keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang menjadi 95 %.
 - Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku remaja tentang perencanaan kehidupan berkeluarga.
 - Meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- 4) Arah kebijakan Pembangunan Kependudukan dan KB tahun 2013.

- a) Revitalisasi program KB, yang ditekankan penurunan *unmet need* melalui percepatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan KB melalui penguatan kapasitas tenaga dan kelembagaan KB di lini lapangan. Peningkatan layanan keluarga sejahtera, promosi dan penggerakkan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan kependudukan, peningkatan dukungan sarana dan prasarana pelayanan program KB, peningkatan sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi dan dilakukan pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB, serta peningkatanb kualitas manajemen program.
- b) Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk, yang ditekankan pada diseminasi peraturan perundangan pengendalian penduduk, perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, pengembangan gerakan Perilaku Hidup berwawasan Kependudukan (PHBK) dan pengembangan pemetaan (*Geographic Information System/GIS*) dampak kependudukan terhadap pembangunan serta penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait, dilaksanakan penguatan kemitraan dengan berbagai pihak terutama dengan perguruan tinggi dan Pusat Studi Kependudukan.

5) Fokus Prioritas Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah :

a) Revitalitas Program KB dengan kegiatan-kegiatan :

- Peningkatan pembinaan keikutsertaan ber KB baik melalui jalur pemerintah maupun swasta.
- Peningkatan kesertaan ber-KB daerah khusus atau sasaran khusus.
- Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi.

b) Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk dengan kegiatan :

- Pemaduan kebijakan pengendalian penduduk.
- Perencanaan pengendalian penduduk
- Kerjasama pendidikan kependudukan dan analisis dampak kependudukan.
- Peningkatan advokasi dan KIE program kependudukan dan KB.
- Peningkatan kemitraan dengan lintas sektor dan pembinaan lini lapangan.
- Penyediaan data dan informasi program kependudukan dan KB

c) Penyediaan teknologi, informasi dan dokumentasi program KKB .

Untuk mengembangkan dan melakukan sosialisasi pengendalian kependudukan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dengan menyelaraskan kebijakan pengendalian penduduk maka arah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan regulasi pengendalian penduduk sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang akan

menjadi dasar penyusunan rancangan induk kependudukan.

- b. Perumusan kebijakan pengendalian penduduk yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
- c. Penyediaan parameter kependudukan yang disepakati oleh lintas sektor terkait dan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor.
- d. Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku keluarga dan masyarakat serta komitmen lintas sektor tentang masalah pembangunan berwawasan kependudukan.
- e. Peningkatan komitmen stakeholders tentang program kependudukan melalui kajian analisis dampak dalam rangka penyerasian kebijakan berwawasan kependudukan.

Adapun strategi yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan dan penyerasian kebijakan program pembangunan berwawasan kependudukan.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur, mitra kerja dan stakeholders di bidang kependudukan melalui monitoring, evaluasi dan pembinaan program – program pembangunan berwawasan kependudukan.
- c. Melakukan advokasi, sosialisasi, promosi dan fasilitasi kepada semua stakeholders tentang pengendalian penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.

- d. Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan berbagai parameter kependudukan seperti struktur, pertumbuhan, kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk.

4.2. Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah

1. Kepadatan Penduduk

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang mempunyai jumlah penduduk yang padat yaitu 32.382.657 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 %. Angka kepadatan penduduk provinsi Jawa Tengah juga mengalami kenaikan dari 995 jiwa/ km² (tahun 2010) menjadi 1.003 jiwa/km² pada tahun 2013.

Akibat yang timbul akibat ledakan penduduk adalah :

- a. Persaingan Lapangan Pekerjaan, semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin banyak orang memperebutkan lapangan pekerjaan.
- b. Persaingan untuk mendapat permukiman, kondisi ini biasanya terjadi di kota-kota besar, mereka yang tidak mendapatkan permukiman yang terjangkau biasanya tinggal di kawasan kumuh.
- c. Persaingan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, penambahan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana mengakibatkan tidak semua penduduk memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak.
- d. Kebutuhan akan fasilitas sosial, kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya meningkat.
- e. Meningkatnya angka kriminalitas, gelandangan, pengemis dan lain-lain

- f. Terjadinya polusi dan kerusakan lingkungan

- g. Tingkat kemiskinan semakin meningkat.

- h. Kekurangan pangan yang menyebabkan kelaparan dan gizi rendah.

Dari berbagai permasalahan kependudukan yang timbul akibat ledakan penduduk adalah adanya penyebaran penduduk yang tidak merata serta tingginya urbanisasi. Hal ini akan menyebabkan tingkat kepadatan penduduk daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah perkotaan menjadi tinggi.

2. Kualitas Hidup Masyarakat Jawa Tengah

a. Tingkat Pendidikan

87,46 %. Untuk Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12 tahun sebesar 97,28 %, 13-15 tahun sebesar 84,84%, 16 -18 tahun sebesar 50,64 % , 19 – 24 tahun sebesar 12,93 % Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Jawa Tengah masih tergolong relatif rendah karena Berdasarkan hasil SP2010, penduduk Provinsi Jawa Tengah usia 5 tahun ke atas yang tamat SM/ sederajat sebesar 14,51 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 1,64 persen, tamat DIV/S1 sebesar 2,29 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,14 persen. Namun untuk Angka Melek Huruf di Jawa Tengah sudah cukup tinggi. Di perkotaan sudah mencapai 93,68 %. Sedangkan untuk pedesaan mencapai.

b. Tingkat Kesehatan

Untuk provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 tingkat kesehatannya cukup tinggi dengan

Angka Kematian Bayi sebesar 10,75 dan Angka Harapan Hidupnya sebesar 72,6 . (Dinkes Jawa Tengah,)

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 untuk jumlah rumah sakit pemerintah sebanyak 67 buah, sementara rumah sakit khusus dan rumah sakit umum swasta tahun 2011 tercatat 179 buah. Didukung pula oleh tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 867 buah Puskesmas di Jawa Tengah.

c. Tingkat Pendapatan

Menurut BPS (2011) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 meningkat dari 5,84 % pada tahun 2010 menjadi 6,01 % pada tahun 2011 sedangkan PDRB atas dasar harga yang berlaku mencapai 15,4 juta rupiah naik 11,97% dari tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 mencapai Rp. 452.840 perbulan. Rasio ketergantungan Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,31 artinya tiap 100 penduduk produktif menanggung 50,31 penduduk tidak produktif (SP 2010). Melihat data tersebut kualitas penduduk Jawa Tengah menurut tingkat pendapatannya sudah cukup meningkat dari tahun-tahun sebelumnya walaupun rasio ketergantungannya masih cukup tinggi.

d. Mata Pencarian / Pekerjaan

Menurut BPS (2010)Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sebesar 16 314 487 orang, di mana sejumlah 15 848 871 orang

diantaranya bekerja, sedangkan 465 616 orang merupakan pencari kerja. Dari hasil SP 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 68,55 persen, di mana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 82,15 persen dan 55,47 persen. Sementara itu, bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, TPAK di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 64,84 persen dan 71,69 persen. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Boyolali (74,88), Kabupaten Wonogiri (74,82), dan Kabupaten Grobogan (74,42). Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 465 616 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 2,85 persen Dengan melihat data tersebut Provinsi Jawa Tengah masih harus memikirkan bagaimana caranya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, sebab apabila tidak dilakukan akan berakibat pada kualitas hidup masyarakatnya, karena bila mereka tidak bekerja mereka tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

e. Tingkat Kemiskinan penduduk

Menurut BPS (2013) Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2013 mencapai 4.733.000 orang (14,56 persen), berkurang 130.460 orang (0,42 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 4.863.000 orang (14,98 persen).

f. **Indek Pembangunan Manusia (IPM)**

Menurut laporan BPS tahun 2012 Angka IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ketahun mengalami kenaikan untuk tahun 2011 IPM Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 72,94 masih dibawah Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 76,32, namun masih diatas provinsi Jawa Barat (72,73) dan Jawa Timur (72,18).

4.3. Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat

Daerah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi biasanya terjadi di daerah-daerah perkotaan dimana banyak para urban yang mendatangi kota-kota tersebut. Dampak kepadatan penduduk yang paling tinggi adalah penurunan kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, pendapatan dan pekerjaan). Dengan pendidikan yang rendah akan masuk pada pekerjaan di sektor informal dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan baik kesehatan, pangan maupun papan, hal ini menyulitkan mereka untuk mencapai hidup yang sejahtera atau berkualitas.

4.4. Strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah

Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dalam bidang :

1. Pendidikan

- Menggalakkan program wajib belajar 9 tahun.

- Menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar
- Membuka jalur-jalur pendidikan alternatif atau non formal (seperti kursus-kursus keterampilan dll)

2. Kesehatan

- pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat
- Melaksanakan program peningkatan kualitas lingkungan, baik dengan kemampuan sendiri ataupun melalui kerja sama dengan luar negeri (misalnya *Kampung Improvement Programme* (KIP))
- melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga ke pelosok desa.
- program asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin) untuk keluarga miskin (prasejahtera).

3. Pendapatan

- Memberikan subsidi keluarga miskin melalui berbagai program sosial.
- Meningkatkan standar upah buruh atau upah minimum kota.
- Memberikan modal atau pinjaman lunak dan pelatihan kepada para pengusaha mikro dan pengusaha kecil

4. Mata Pencaharian / pekerjaan

- Mengadakan program padat karya
- Meningkatkan penyaluran, penyebaran, dan pemanfaatan tenaga kerja melalui Program Penggunaan dan Penyebaran

Tenaga Kerja (PPTK), Bursa
Tenaga Kerja,

- Meningkatkan keterampilan dan Meningkatkan hubungan perburuhan yang mantap dan dinamis

Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dalam bidang :

1. Pendidikan

- Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan terutama dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Pendampingan BOS , pemberian bea siswa bagi keluarga tidak mampu

2. Kesehatan

- program jamkesmas dan jamkesda, peningkatan penjangkauan dan penanganan kasus gizi kurang dan gizi buruk, pelayanan MOW dan MOP dalam rangka mendukung program KB, peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga miskin perkotaan dan perdesaan,
- Meningkatkan penyediaan dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana air bersih serta meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman
- pemberian vitamin A pada anak balita di desa tertinggal dan peningkatan status gizi murid sekolah melalui pemberian makanan tambahan bagi anak-anak SD keluarga miskin terutama di desa tertinggal.

3. Pendapatan

- Meningkatkan pengembangan usaha menengah dan kecil, termasuk usaha informal dan tradisional melalui hubungan kemitraan usaha, permodalan, perijinan serta pendampingan.

4. Pekerjaan

- Meningkatkan keterampilan dan keahlian serta profesionalisme tenaga kerja
- Meningkatkan pembinaan hubungan industrial yang serasi antara pekerja dan pengusaha
- Meningkatkan perlindungan tenaga kerja
- Pengembangan kewirausahaan

4.5. Strategi dan kebijakan antisipasi peledakan penduduk Provinsi Jawa Tengah

1. Strategi yang diambil:

- Menganangkan program Keluarga Berencana (KB) dan memberikan kemudahan untuk menjadi akseptor Keluarga Berencana.
- Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
- Melaksanakan program transmigrasi
- Melaksanakan program pemerataan pembangunan dengan cara mendistribusikan perusahaan atau industri di pinggir kota selain di pulau Jawa.

2. Kebijakan yang diambil:

- peningkatan keluarga berencana mandiri dengan dukungan dari dinas terkait

- mengarahkan persebaran penduduk yang lebih merata terutama ke daerah jarang penduduk, melalui program transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa berbantuan dan transmigrasi swakarsa mandiri.

I. PENUTUP

1. Kebijakan dibidang kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sudah cukup memadai, hal ini dibuktikan dengan upaya peningkatan KB mandiri, peningkatan Keluarga Sejahtera, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB, walaupun masih banyak kelemahan terutama dalam sosialisasi program pengendalian penduduk mupun ketersediaan data diantaranya data base kesertaan ber-KB, pelayanan KB serta tenaga penyuluh lapangan sebagai lini terdepan dalam keberhasilan program KB.
2. Kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah di bidang pendidikan masih rendah (pendidikan masih rendah apabila dilihat dari pendidikan terakhirnya, yaitu tamat Sekolah menengah sebesar 14,51%, Angka Melek Huruf masyarakat Jawa Tengah sudah cukup tinggi yaitu 93,68%, Tingkat kesehatan masyarakat Provinsi Jawa Tengah sudah cukup tinggi terbukti dari Angka Kematian Bayinya rendah yaitu sebesar 10,75%, sedangkan Angka Harapan Hidupnya tinggi yaitu sebesar 72,6%.
3. Tingkat pendapatan masyarakat Provinsi Jawa Tengah sudah cukup meningkat walaupun ratio ketergantungan masih cukup tinggi yaitu 50,31
4. Kondisi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik , hal ini bisa dilihat dari jumlah angkatan kerja sebesar 16.314.987 orang, 15.848.871 orang sudah bekerja dan 465.616 orang sedang mencari kerja.
5. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah sudah mengalami penurunan walaupun sedikit. Yaitu dari 4.863.000 orang (14,98%) pada september 2012 menjadi 4.733.000 orang (14,56%) pada Maret 2013. Sedangkan Indek Pembangunan Manusia mencapai 72,94 .
6. Provinsi Jawa Tengah mempunyai jumlah penduduk yang besar yaitu sebesar 32.382.657 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,37 % . Dari kondisi ini menyebabkan angka kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah menjadi sangat besar yaitu 995 jiwa/ Km²

II. REKOMENDASI

1. Melaksanakan sosialisasi pengendalian penduduk untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan terutama pada Pasangan Usia Subur maupun kepada generasi muda melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
2. Menggerakkan dan pemberdayaan masyarakat dengan metode pendekatan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) untuk mengembangkan Program Keterpaduan KB-Kesehatan menjadi program Desa Siaga.
3. Meningkatkan *capacity building* bidang kependudukan dan KB kepada seluruh SKPD pengampu program Kependudukan dan Keluarga Berencana
4. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesertaan Ber-KB dari tingkat kota/ kabupaten sampai tingkat desa/ kelurahan
5. Mengoptimalkan Program Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan menjalin kemitraan yang kuat

dengan lembaga pemerintah yang lain, Perguruan Tinggi, Forum Antar Umat Beragama serta lembaga-lembaga yang konsen terhadap program ini.

6. Melaksanakan program transmigrasi.

III. DAFTAR PUSTAKA

Malthus T.R., 1978, *Principles Of Population (7th, ed)* London, J.Johnson.
Mantra Bagoes Ida, 2007, *Demografi Umum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset.
Samadi, 2007, *Geografi 2 SMA kelas XI*, Jakarta, Quandra.
Saraswati, Mila, Widaningsih, Ida, 2008, *Be Smart Ilmu Pangetahuan Sosial*, Jakarta, Grafindo.

Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, Rafika Aditama.

Bacaan Lain :

Badan Pusat Statistik, 2008, *Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007*.

Badan Pusat Statistik, 2012, *Jawa Tengah Dalam Angka 2012*.

Badan Pusat Statistik, 2012, *Laporan BPS tahun 2012*.

Badan Pusat Statistik, 2012, *Sensus Penduduk 2010*.

Badan Pusat Statistik, 2013, *Berita Statistik Provinsi Jawa Tengah 2013*.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana , 2012, *Arah Kebijakan dan Strategi BKKBN Tahun 2013*.

Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010

www.dinkesjatengprov.go.id/./bukusaku-kesehatan

www.dinkesjatengprov.go.id

www.balitbangjateng.go.id